



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARPU'AH**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **631456**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/90 m2 di TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 2287 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1031 m2/160 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 8000 m2 di TUBAN, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 253 m2 di TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 262 m2 di TUBAN, LAINNYA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 848.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO NC 110 D SPM. SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, SUZUKI NMAX NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, ISUZU PANTHER THOURING Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, ISUZU PANTHER THOURING Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. MOBIL, ISUZU PHANTER TOURING Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



7. MOBIL, ISUZU PHANTER TOURING Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
8. MOBIL, MITSUBISHI FE 71 PS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	54.497.225
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.327.497.225
III. HUTANG	Rp.	962.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.364.997.225

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.